

# BPK Kritik BPD

## ■ Porsi Kredit Konsumsi di Atas 70%

JAKARTA, TRIBUN - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap bank pembangunan daerah (BPD) November lalu, memang ada benarnya.

Auditor negara itu mengkritik habis-habisan minimnya peran bank milik pemerintah daerah (pemda) dalam menggerakkan perekonomian daerah, karena terlalu banyak mengucurkan kredit konsumsi ke pegawai pemda.

Kebenaran kritik itu tecermin dari laporan perkembangan bisnis BPD hingga akhir November 2011. Kredit konsumsi terlalu mendominasi, porsinya rata-rata di atas 70 persen. Pengelola BPD berkilah, permintaan kredit modal kerja di daerah tidak terlalu banyak.

Bank Maluku misalnya, di November, kredit konsumsi berkontribusi 70 persen dari total kredit senilai Rp 2,5 triliun. Zainuddin Umasangadji, Komisaris Bank Maluku, mengklaim, bukan hanya pihaknya yang getol menyalurkan kredit jenis tersebut.

Bank umum dan bank perkreditan rakyat yang beroperasi di Maluku hampir semuanya menyalurkan kredit non-produktif. "Kami tidak mungkin bekerja sendiri untuk sektor rill tapi harus juga didorong pemerintah setempat," katanya, Rabu (21/12).

Kredit konsumsi juga menjadi motor pertumbuhan Bank Riau Kepri. Porsinya mencapai 70 persen dari total kredit Rp 8,7 triliun per November 2011. Mes-

ki porsinya sangat besar, menurut Erzon, Direktur Utama BPD Riau, debitur banyak menggunakan dana mereka untuk kegiatan produktif.

Misalnya, membeli kebun kelapa sawit. "Pencatatan memang ke kredit konsumsi, tapi realisasinya hampir 50 persen digunakan untuk berinvestasi," katanya. Dia menambahkan, di Riau mengoleksi lahan sawit tengah menjadi tren. Kedua BPD ini berencana mengubah komposisi kredit tahun depan. Mereka akan menggenjot pembiayaan produktif. "Kami mengincar komposisi 60:40," kata Erzon. Untuk mencapai target itu, ia bakal aktif mendekati korporasi di Riau dan mengincar rekanan pemda. (kontan)